
*Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP)
BPMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015.

Penyusunan LKjIP tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban kami selaku pejabat publik kepada masyarakat berkaitan dengan kinerja lembaga Pemerintah selama satu Tahun Anggaran 2015. Kegiatan yang kami lakukan selama Tahun Anggaran 2015 merupakan penerapan/perwujudan dari program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 tersebut dituangkan dalam bentuk informasi tentang uraian singkat organisasi BPMD Provinsi Jawa Tengah dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama yang dihadapi selama tahun 2015. Disamping itu juga disajikan rencana dan target kinerja yang ditetapkan dalam setiap sasaran atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, juga mencakup efisiensi penggunaan sumber daya yang dijabarkan dengan transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih Kepada Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Para Penanam modal di Jawa Tengah dan semua pihak yang telah membantu, sehingga target kinerja BPMD bisa tercapai. Diharapkan LKjIP

ini dapat menjadi acuan kinerja dalam meningkatkan penanaman modal di Jawa Tengah dimasa yang akan datang.

Semarang, Pebruari 2016
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa Tengah

Ir. Sujarwanto Dwiatmoko.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 199203 1 012

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPMD Provinsi Jawa Tengah ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Tugas pokok Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal Daerah dan melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD dan Peraturan Gubernur No.86 tahun 2011 tentang penjabaran tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu satu pintu pada Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah.

Fungsi Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan terpadu;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik melalui sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara secara elektronik (SPIPISE);
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu;
6. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;

-
7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. FUNGSI STRATEGIS BPMD PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dimaksud, maka BPMD Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki Fungsi Strategis Yaitu: **Penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing dan ramah lingkungan.**

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh BPMD Provinsi Jawa Tengah guna menarik investasi yang sebesar-besarnya dilakukan melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Penguatan task force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Penajaman potensi penanaman modal melalui koordinasi lintas sektor;
6. Peningkatan promosi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Adapun permasalahan utama Badan Penanaman Modal Daerah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan di Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

C.1. Permasalahan Penanaman Modal:

1. Keterbatasan lahan (pembebasan, harga tinggi, status tanah HM, makelar/Calo);
2. Kesiapan daerah/masyarakat dalam menerima calon investor (data, SDM, regulasi, komitmen, advokasi, kepentingan politis);
3. Terbatasnya kawasan industri (masih terkonsentrasi di Kota Semarang);

-
4. Belum optimalnya sarpras kawasan industri yang telah ada;
 5. Ketidaksiesuaian lokasi yang diminati investor dengan RTRW;
 6. Kurangnya sinergitas program kerja SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung peningkatan iklim investasi;
 7. Tidak adanya insentif yang diberikan kepada pengusaha kawasan industri.

C.2. Permasalahan Pelayanan Perizinan:

1. Adanya Kepala Daerah yang belum melimpahkan kewenangan kepada Kepala PTSP;
2. Tidak sinkron dan tumpang tindihnya perizinan Daerah dengan perizinan Pusat;
3. Masih adanya perizinan yang tujuannya untuk mendapatkan PAD;
4. Mutasi pegawai yang cepat di Kabupaten/Kota;
5. Gedung UPT PTSP Provinsi Jawa Tengah masih kurang memadai;
6. SDM UPT PTSP Provinsi Jawa Tengah masih kurang memadai.

Penguatan Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 86 orang, terdiri dari 48 orang atau 55,81 % berjenis kelamin laki-laki dan 38 orang atau 44,18 % merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di BPMD Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S2, S1, SLTA, SLTP, dan SD jumlah PNS dengan

pendidikan S2 sebanyak 15 orang atau 17,44% dari total PNS BPMD, PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 29 orang atau 33,72% dari total PNS BPMD, PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 28 orang atau 28% dari total PNS BPMD, pendidikan SLTP sebanyak 7 orang atau 7% dari total PNS BPMD dan pendidikan SD sebanyak 2 orang atau 2,32 % dari total PNS BPMD.

Tabel 1.1

Jumlah PNS di BPMD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Desember Tahun 2015

Keterangan	S2	S1	D3	D2/D	SLT	SLTP	SD	Jumlah
	1	A	1	A				
Laki-Laki	9	13	-	-	17	7	2	48
Perempuan	6	16	5	-	11	-	-	38
Jumlah	15	29	5	-	28	7	2	86
Persen thd total	17,4 4	33,7 2	5,8	0	32,55	8,13	2,32	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD

D. SARANA DAN PRASARANA

Aset yang dimiliki Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Aset yang dimiliki BPMD Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Barang	Volume
1	Tanah	1 buah = 3.320 M ²
2	Alat Berat	9 buah
3	Alat Angkut	17 buah
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2284 buah
5	Alat Studio	140 buah
6	Gedung	2 gedung = 2027,36 M ²

7	Jaringan instalasi listrik bangunan air irigasi sumur artesis	1 buah	
8	Buku Perpustakaan	1133 buku	

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD

Sedangkan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11 buah untuk roda empat dan 6 buah untuk roda dua dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Sedan	2
2	Station Wagon	9
3	Sepeda Motor	6

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD

E. SISTEMATIKA

LKj IP ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 BPMD Provinsi Jawa Tengah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Badan Penanaman Modal Daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
- Bab II : Perjanjian Kinerja
Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, Visi dan Misi BPMD Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2015
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran BPMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengungkapkan dan menyajikan pengukuran kinerjanya.
- Bab IV : Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan tinjauan umum capaian kinerja BPMD Provinsi Jawa Tengah dan Strategi untuk peningkatan Kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN DALAM RENCANA STRATEGI 2013-2018

Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan kinerja Tahun 2013-2018 BPMD Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/176 Tahun 2015 tentang Revisi Pertama Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/902 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

A.1. Visi dan Misi

Visi Badan Penanaman Modal yang ingin dicapai selama lima tahun yaitu periode 2013-2018 adalah **“Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari”**.

Dalam mengimplementasikan visi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang mampu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, dijabarkan dalam 6 (enam) misi pembangunan daerah bidang investasi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;

- c. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
- d. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- e. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
- f. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam jangka pendek yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada isu-isu analisis strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

Tabel II.1.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha	1. Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional	2. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal	3. Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal	4. Meningkatkan realisasi penanaman modal

5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal	5. Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal	6. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpas aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal

Adapun misi yang telah ditetapkan tersebut, dilanjutkan pada penetapan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel. II.1.2

**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI**

No	Indikator Kinerja	Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
1.	1) Jumlah investor/per-usahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN dan PMA)	83	36	83	251,51	44,86%	100
	2) Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp Trilyun)	11,067	3,374	8,561	253,73	3,682	100

3) Daya serap tenaga kerja (orang/perusahaan)	492	1.342	1.231	92	1.283	100
---	-----	-------	-------	----	-------	-----

Tabel. II.1.3

**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Th.2013	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
				Target	Real.	% Capaian		
1.	1) Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	persen	100	100	100	100	100	20
	2) Lama perijinan investasi	hari	10	10	10	100	8	80
Persentase Capaian Sasaran Strategis						100		100

A.3. Strategi, kebijakan dan Program

Perumusan strategis yang ditetapkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah disepakati, maka upaya pencapaiannya dan dijabarkan dalam sasaran yang lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan yang dapat diukur melalui capaian kinerja

dan rumusan yang terdapat didalam indikator kinerja sebagai tolok ukur kinerja.

A.3.1 Strategi

Strategi dalam mencapai sasaran Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa diarahkan/terfokus pada peningkatan realisasi penanaman modal pada periode 2013-2018, melalui sasaran misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing dan kepentingan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional dan di dukung dengan sarana prasarana yang memadai;
3. Mendorong berkembangnya iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran penanaman modal;
4. Meningkatkan realisasi penanaman modal dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang terpadu dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral;
6. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing penanaman modal.

A.3.2. Kebijakan

Sasaran dari kebijakan program kerja kegiatan terjabarjan dalam kebijakan dan strategis antara lain :

1. Memperkuat peranan penanaman modal terhadap perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan;

-
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
 3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan perekonomian daerah;
 4. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal.

A.3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat BPMD;
- 2) Penyediaan jasa surat menyurat PTSP BPMD;
- 3) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat BPMD;
- 4) Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD;
- 5) Penyediaan jasa kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat BPMD;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor sekretariat BPMD;
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor PTSP BPMD;
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat BPMD;
- 9) Penyediaan barang cetak dan penggandaan PTSP;
- 10) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor Sekretariat BPMD;
- 11) Penyediaan komponen instalasi listrik/ bangunan Kantor Sekretariat BPMD;
- 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat BPMD;

-
- 13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PTSP BPMD;
 - 14) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Sekretariat BPMD;
 - 15) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan PTSP BPMD;
 - 16) Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat BPMD;
 - 17) Penyediaan Makanan dan Minuman PTSP BPMD;
 - 18) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah Sekretariat BPMD;
 - 19) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah PTSP BPMD;
 - 20) Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat BPMD;
 - 21) Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PTSP BPMD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat BPMD;
- 2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor PTSP BPMD;
- 3) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat BPMD;
- 4) Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Sekretariat BPMD;
- 5) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor dan rumah Tangga Sekretariat BPMD;
- 6) Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Sekretariat BPMD;
- 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor sekretariat BPMD;
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PTSP BPMD.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Sekretariat BPMD
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya PTSP BPMD.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD;

-
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Formal PTSP BPMD;
 - 3) Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat BPMD.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- 1) Promosi dalam dan luar negeri;
- 2) Kerjasama Penanaman Modal;
- 3) Sekretariat FPESD.

6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

- 1) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
- 2) Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi;
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal;
- 4) Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 5) Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP;
- 6) Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP.

7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

- 1) Penyusunan Profil dan Potensi Investasi;

8. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

- 1) Pendidikan kemasyarakatan.

Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk menajamkan perencanaan pembangunan maka Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan inovasi perencanaan dan pengendalian pembangunan. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan menyiapkan perangkat-perangkat pembantu untuk mempermudah pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian seperti pembuatan kalender perencanaan, penganggaran dan pengendalian.

Operasional kegiatan yang telah direncanakan dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kerangka waktu pelaksanaan proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian dan pembagian peran siapa melakukan apa dan waktu dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan serapan anggaran yang direncanakan.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015:

Tabel II.1.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatnya Kepeminatan Penanaman Modal Melalui Efektifitas Kegiatan Promosi Dan Kerjasama Yang Tepat	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM Dan Koperasi Dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/tahun)	3 kali	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal	613.750.000

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Sasaran;	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Peluang Penanaman Modal Provinsi	4 kali	Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri	1.631.270.000
		Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan (sektor/Bidang/ Usaha/tahun)	1 sektor	Kegiatan Penyusunan Profil dan Potensi Investasi	508.250.000
2.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Serta Pembinaan Di Bidang Penanaman Modal;	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha (Prosentase)	100	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP	606.650.000
				Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP	517.250.000

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Persentase Implementasi Sistem Pelayanan Informasi Dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100	Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi	414.675.000
				Kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota	410.175.000
3.	Meningkatnya Kualitas Iklim Dan Pengembangan Penanaman Modal;	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (Kegiatan)	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-
		Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (Kegiatan)	1	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan	
4.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Yang Berorientasi	Jumlah Investor PMDN Dan PMA (Proyek)	36	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan;	Jumlah Nilai Investasi (PMDN Dan PMA) (Rp. Trilyun)	3,374	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	613.645.000
		Daya Serap Tenaga Kerja (orang)	1.342		
5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Dan Terkoordinasi Baik Lintas Sektor Dan Daerah;	Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan BPMD (Dokumen)	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	648.050.000
6.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Tersedianya Sarpras Aparatur Untuk Mendukung Peningkatan	Jumlah Aparatur BPMD Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Aparatur Penanaman Modal.	50	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD	30.000.000
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD	374.825.000

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Daya Saing Penanaman Modal.			Pendidikan dan Pelatihan Formal UPT PTSP	30.000.000

C. ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni APBD, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 sebesar Rp 26.203.544.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.786.714.000,00 (45%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 14.416.830.000,00 (55%). Adapun realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp 22.436.172.218,00 (96%) dengan rincian unuk Belanja Tidak Langsung Rp. 9.051.851.018,00 (92,08%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 13.384.321.200,00 (92,00%).

Tabel II.1.5
Pagu anggaran BPMD Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Pagu (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	11.786.714.000,00	45
2.	Belanja Langsung	14.416.830.000,00	55
Jumlah		26.203.544.000,00	100

Sumber: Subbag Program BPMD Prov.Jateng

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1.6
Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2015

No	Sasaran	Anggaran	Persentase Anggaran
1.	Meningkatnya Kepeminatan Penanaman Modal Melalui Efektifitas Kegiatan Promosi Dan Kerjasama Yang Tepat Sasaran;	2.753.270.000	19,10
2.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Serta Pembinaan Di Bidang Penanaman Modal;	1.948.750.000	13,52
3.	Meningkatnya Kualitas Iklim Dan Pengembangan Penanaman Modal;	-	,-
4.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Yang Berorientasi Pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan;	613.645.000	4,26
5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Dan Terkoordinasi Baik Lintas Sektor Dan Daerah;	648.050.000	4,50
6.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Tersedianya Sarpras Aparatur Untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.	434.825.000	3,02
Jumlah		6.398.540.000	44,38
Belanja Langsung Pendukung		8.018.290.000	55,62
Total Belanja Langsung		14.416.830.000	100,00

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 6.398.540.000 atau sebesar **44,38%** dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 8.018.290.000 atau **55,62%** dari total anggaran belanja langsung.

D. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Di dalam penyaluran informasi peluang investasi di daerah membutuhkan rangkaian infrastruktur pendukung agar dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat, maka Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan inovasi-inovasi dalam hal penyediaan informasi penanaman modal dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi:

1. Website Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Website BPMD merupakan sebuah website yang ditujukan untuk dapat lebih memberikan layanan informasi, pelayanan investasi bagi calon investor dalam maupun luar negeri. Selain membantu memberikan informasi, website menyajikan informasi potensi investasi daerah dalam bentuk yang dinamis dan komunikatif bagi para investor dan calon investor yang akan berinvestasi di provinsi Jawa Tengah.

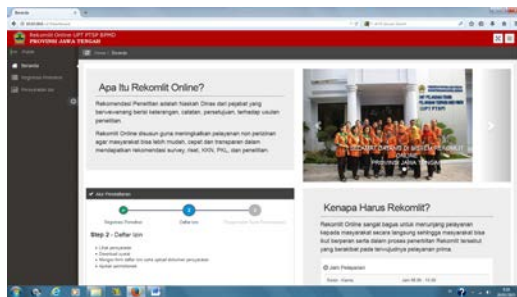


Landing Page



2. Website sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor pada UPT PTSP. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan Rekomendasi Penelitian Online pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani perizinan dan non perizinan, website menyajikan informasi perizinan dan prosedur pengurusan perizinan dan non perizinan dengan sistem online.



Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada UPT PTSP

Kondisi Sekarang	Sistem di Bangun 2016
1. Online dengan SKPD teknis	
2. Call center	

3. SMS Gateway	
4. Online dengan pemohon (PMDN)	
5. Survey Kepuasan Masyarakat (digital)	
6. Server berkapasitas 1 Tera	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat baik	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja kegiatan dengan realisasi kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1:** Meningkatnya Kepeminatan Penanaman Modal Melalui Efektifitas Kegiatan Promosi Dan Kerjasama Yang Tepat Sasaran;

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
1.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Provinsi (kali)	100	4	4	100	20	100
2.	Jumlah calon investor yang berminat berinvestasi di Jawa Tengah (Investor)	100	50	50	100	250	100
3.	Terlaksananya	100	3	3	100	15	100

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015		% Capaian	Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.			
4.	Jumlah kepeminatan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha nasional/asing (kali/tahun)	100	60	60	100	350	100
5.	Terlaksananya kegiatan Sekretariat FPESD	100	4	4	100	20	100
6.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan (Jumlah profil)	100	140	140	100	350	100

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
7.	Terlaksananya fasilitasi pengembangan peluang investasi (kali/%)	100	3/40	3/40	100	15/100	100
8.	Terlaksananya Bimtek penyusunan profil peluang investasi (orang)	105	315	315	100	525	100

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kepeminatan Penanaman Modal Melalui Efektifitas Kegiatan Promosi dan Kerjasama yang Tepat Sasaran dapat dicapai sesuai dengan target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1, untuk tahun 2015 sebesar Rp 2.712.542.510,00 atau 98,52% dari total pagu Rp 2.753.270.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,48% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi dengan kegiatan Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Dalam dan Luar Negeri dan Penyusunan Profil dan Potensi Investasi.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Serta Pembinaan Di Bidang Penanaman Modal;

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
1.	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui:						
a.	PTSP di bidang PM (%)	100	100	100	100	100	100
b.	Implementasi SPIPISE (%)	100	100	100	100	100	100
c.	Penyelenggaraan Bimtek (kali/%)	100	1/20	1/20	100	5	100
d.	Sosialisasi Kebijakan (kali/%)		1/20	1/20	100	5	100
e.	Jumlah Investor		36	91	252,78%	40	100
f.	Nilai investasi (Rp Triliyun)		3,37	8,56	254,01%	3,85	100
g.	Daya Serap Tenaga Kerja (orang)		1342	1231	91,73%	1283	100
2	Terdidiknya sumber daya manusia PTSP yang berkualitas dan profesional (orang)	60	60	60	100	60	100

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
3	Tersebar nya informasi peraturan/kebijakan akan perizinan (kgt/org)	3	3	3	100	15	100
4	Terlaksananya pembinaan kelembagaan PPTSP (Forum/Lembaga PTSP)	8	8	8	100	40	100
5	Terselenggaranya Orientasi Kinerja PTSP ke Provinsi lain	1	1	1	100	5	100
6	Terwujudnya sinkronisasi pelaporan kinerja PTSP dan Perizinan PM	3	3	3	100	15	100
7	Terimplementasikan nya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	75	100	100	100	100	100
8	Terwujudnya percepatan realisasi	3	3	3	100	15	100

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
	perizinan penanaman modal melalui SPIPISE (kali/%)						

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan serta Pembinaan di Bidang Penanaman Modal dapat dicapai sesuai target. Capaian ini ditandai dengan meningkatnya Jumlah Produk Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan oleh UPT PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6.726 pada Tahun 2015 dibanding Tahun 2014 sebanyak 4.690, atau mengalami peningkatan sebesar 143,41%.

Tabel III.2

JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG DITERBITKAN TAHUN 2015

NO	BIDANG	JUMLAH	Jenis Layanan	
			Izin	Non Izin
1	Penanaman Modal	141	141	-
2	Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan	346	346	-
3	Koperasi dan UMKM	239	239	-
4	Kesbangpolinmas	2703	-	2,703
5	Sosial	1	1	-
6	Pengelolaan Sumber Daya Air	263	263	-
7	Kelautan dan Perikanan	1075	1,075	-
8	Kehutanan	117	117	-

9	Pekerjaan Umum	145	128	17
10	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	907	907	-
11	Perindustrian dan Perdagangan	315	13	302
12	Kesehatan	6	6	-
13	Perkebunan	0	-	-
14	Peternakan dan Kesehatan Hewan	128	65	63
15	Lingkungan Hidup	-	-	-
16	Energi dan Sumber Daya Mineral	300	300	-
17	Pendidikan	40	40	-
JUMLAH		6.726	3.641	3.085

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2 adalah sebesar Rp 1.897.071.300,00 atau 97,35% dari total pagu sebesar Rp 1.948.750.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,65% dari pagu yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP, Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP, Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi, Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim Dan Pengembangan Penanaman Modal

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Iklim dan Pengembangan Penanaman Modal dapat dicapai sesuai dengan target. Dengan **Program pendukung** pencapaian Sasaran Strategis 3, antara lain :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi;
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
4. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah;
5. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Namun **Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 3, antara lain:

1. Sarana Prasarana infrastruktur yang belum mendukung pengembangan investasi;
2. Masih adanya regulasi yang masih menghambat realisasi investasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota;
3. Kurangnya dukungan kawasan industri;
4. Belum tersedianya profil dan potensi unggulan investasi secara detail di masing-masing kabupaten/kota.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Melakukan forum koordinasi antar SKPD ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendukung investasi di Jawa Tengah;

-
2. Ditingkatkannya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota terkait regulasi yang menghambat investasi;
 3. Sosialisasi dan penyampaian peringatan kepada perusahaan PMA atau PMDN dan peran serta IPMK dalam mendorong perusahaan untuk mengirimkan LKPM;
 4. Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah yang sudah diploting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kawasan industry tidak diperjualbelikan oleh masyarakat untuk kepentingan di luar peruntukan industri;
 5. Perlunya memaksimalkan kerjasama antar pemerintah, swasta dan para pelaku usaha dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

d. Sasaran 4: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Yang Berorientasi Pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan;

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
1.	Jumlah investor (PMA dan PMDN)	100	36	91	252,78	40	100
2.	Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN)	100	3,37	8,56	254,01%	3,85	100
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)		1.342	1.231	91,73%	1.283	100
4.	Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM/Laporan	100	320	925	289%	395	100

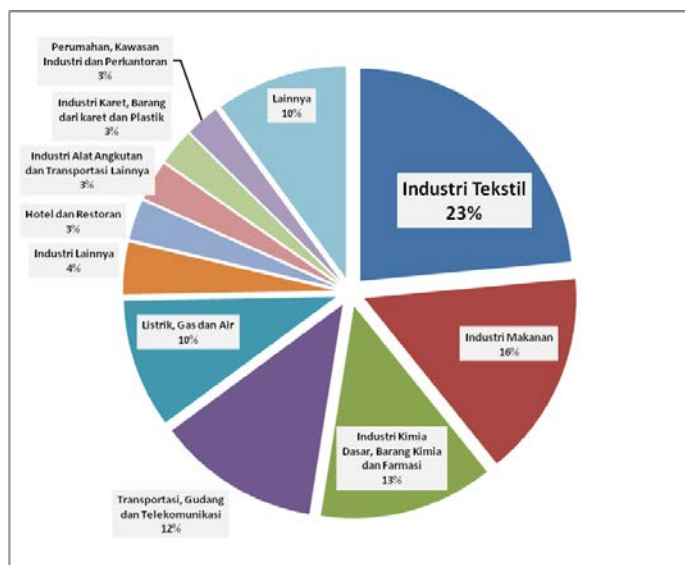
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang berorientasi pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan dapat dicapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian dapat dilihat pada meningkatnya jumlah penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebanyak 925 proyek. Untuk jumlah perusahaan yang merealisasikan proyeknya, pada tahun 2015 sebanyak 91 proyek atau meningkat 109,64% dibanding pada tahun 2014 sebanyak 83 proyek.

Tabel III.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INVESTASI JAWA TENGAH
TAHUN 2015

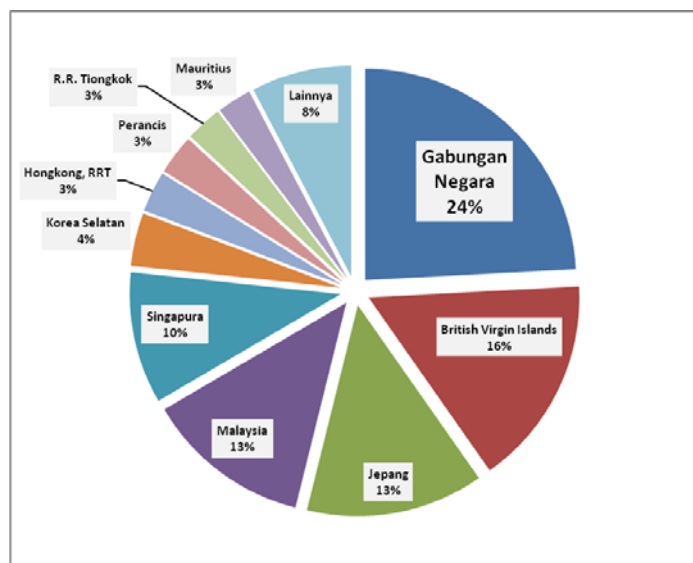
No	Indikator	Realisasi Tahun 2014	Target Kinerja Tahun 2015 (RPJMD 2013 - 2018)	Capaian 2015	
				Jumlah	%
1	Jumlah Investor PMA/PMDN (Proyek)	83	36	91 (IUT)	153
				925 (LKPM)	
2	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Triliyun)	11,068	3,374	8,561 (IUT)	154
				17,988 (LKPM)	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (orang)	487	1342	1231 (IUT)	92
				746 (LKPM)	
4	Lama Perizinan Investasi (Hari)	7	10	7 -	130

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah

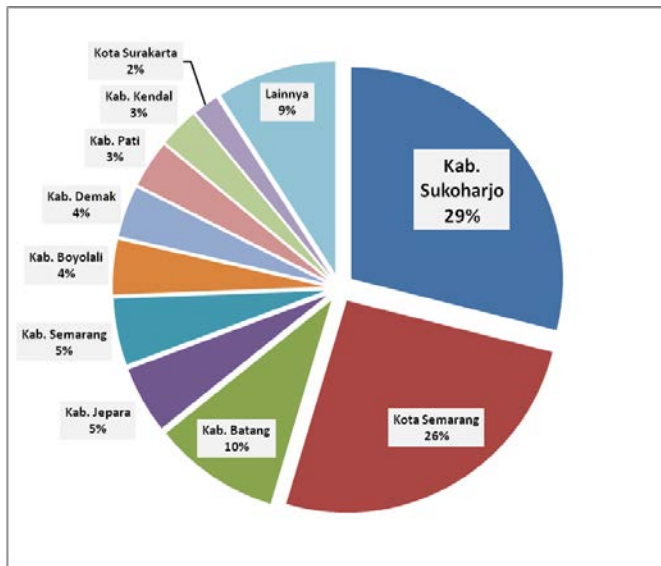
Realisasi PMA 2011 – 2015 Berdasarkan Sektor



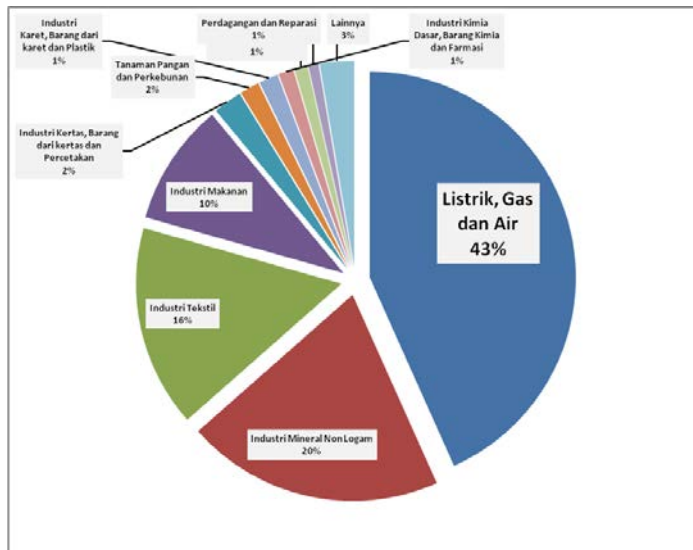
Realisasi PMA 2011 – 2015 Berdasarkan Negara Asal



Realisasi PMA 2011 – 2015 Berdasarkan Lokasi



Realisasi PMDN 2011 – 2015 Berdasarkan Sektor



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 4 adalah sebesar Rp 606.165.650,00 atau 98,78% dari total pagu sebesar Rp 613.645.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,22% dari pagu yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4 tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.

e. **Sasaran 5:** Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Terkoordinasi Baik Lintas Sektor Dan Daerah;

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015				Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
		% Real. Th.2014	Target	Real.	% Capaian		
1.	Jumlah laporan/dokumen pelaksanaan program kegiatan BPMD	4	4	4	100	7	100

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Terkoordinasi Baik Lintas Sektor dan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Capaian ditandai dengan tersusunya dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2015, dokumen DPA Perubahan Tahun Anggaran 2015, penyusunan renja tahun 2016, dan dokumen RKA Tahun 2016.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran III.5 adalah sebesar Rp 461.411.150,00 atau 71,20% dari total pagu sebesar Rp 648.050.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28,80% dari pagu yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 5 tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan kegiatan perencanaan dan penyusunan kebijakan penanaman modal.

- f. **Sasaran 6:** Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Tersedianya Sarpras Aparatur Untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real. Th.2014	Tahun 2015			Target Akhir RPJMD Th.2018	% Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real.	% Capaian		
1.	Terdidiknya dan terlatihnya pegawai Badan Penanaman Modal Daerah (Keg)	-	2	2	100	5	100
2.	Meningkatnya kapasitas dan/kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Penanaman Modal (Keg)	-	210	210	100	20	100
3.	Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jateng (%)	-	15	15	100	100	100

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Tersedianya Sarpras Aparatur Untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal secara umum tercapai sesuai target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 6 adalah sebesar Rp 342.069.600,00 atau 78,67% dari total pagu sebesar Rp 434.825.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 21,33% dari pagu yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 6 tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD, Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD, Pendidikan dan Pelatihan Formal UPT PTSP

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 98,91% dari total anggaran yang dialokasikan, jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada table berikut:

Tabel III.4.

Anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran tahun 2015

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi investasi, yang tertarik dan yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah	2.753.270.000	2.712.542.510	98,52
2	Meningkatnya kerjasama Penanaman Modal antar Daerah /Provinsi Jawa Tengah dengan para investor.	1.948.750.000	1.897.071.300	97,35
3	Meningkatnya kerjasama pengelolaan asset Jawa Tengah dengan para Investor.	-	-	-
4	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Jawa Tengah.	613.645.000	606.165.650	98,78

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan PTSP di bidang Penanaman Modal.	648.050.000	461.411.150	71,20
6	Meningkatnya iklim dan realisasi investasi Jawa Tengah.	434.825.000	342.069.600	78,67
Jumlah		6.398.540.000	6.019.260.210	94,07
Belanja Langsung Pendukung		8.018.290.000	7.281.204.353	90,81
Total Belanja Langsung		14.416.830.000	13.300.464.563	92,26

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi, serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebanyak 24 (duapuluh empat) indikator.

Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun II dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target-target tahun terakhir RPJMD dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

-
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.
 2. Dari analisis 6 sasaran Strategis Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 24 indikator kinerja kegiatan yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2015, ke 24 indikator tersebut memenuhi target yang ditetapkan Sasaran strategis. Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan dengan capaian yang sangat baik, dimana seluruh indikator-indikator sasaran tersebut telah mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP), dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Provinsi Semarang, 2016
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Jawa Tengah

Ir. Sujarwanto Dwiatmoko.Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 199203 1 012